



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat

Telepon: 021-3852478, Faksimili: 021-3441258

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor : DOK-02/SET.M.EKON.ULP.POKJA.II/ROCAN/01/2020

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi secara elektronik sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembangan Sistem Monitoring Analisa dan Pengendalian Terpadu (SMARTER) Berbasis Teknologi Informasi Untuk Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia.
- Lingkup pekerjaan : Pengembangan Sistem Monitoring Analisa dan Pengendalian Terpadu (SMARTER) Berbasis Teknologi Informasi Untuk Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri di Indonesia.
- Nilai total HPS : Rp1.606.852.500,- (satu milyar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk pajak-pajak
- Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2020
- Jangka waktu pelaksanaan : April s.d. September 2020 (enam bulan kalender)

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang terintegrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki izin usaha bidang konsultan manajemen dan lainnya.
- c. Pemahaman yang baik dan menyeluruh dalam pengintegrasikan infrastruktur strategis yang telah dibangun seperti infrastruktur multimoda maupun pergudangan,
- d. Pemahaman yang baik dan menyeluruh dalam peningkatan konektivitas antara infrastruktur strategis dengan pusat-pusat pertumbuhan kawasan industri/pusat (klaster) produksi pangan maupun infrastruktur yang telah/akan dibangun oleh Pemerintah daerah.
- e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- f. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- h. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan menandatangani Pakta Integritas.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE: lpse.lkpp.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 31 Januari 2020

Pokja Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian